

Pandangan Lokal Versus Barat Tentang Puputan Badung: Ekspansi Imperialisme Modern Belanda dalam Konteks Bali¹

I Ketut Ardhana*

Abstract

The Dutch colonial policy in Bali was a rather similar to those of the colonial policies in the rest of the Indonesian archipelago, namely from indirect and informal rule to direct and formal rule. These were due to the limited Dutch colonial man powers in their colonized regions and also due to the fact that there were many traditional cooperations in order to be able to implement their powers, particularly in the 18th to 19th centuries. Indeed, the Dutch colonial policy implemented the indirect and informal power as far as possible and the direct and formal policy if it was necessary in the context of "Pax Neerlandica". However, due to the rise of a certain political development not only in Europe, but also in the Netherlands Indies, this policy could not be maintained any longer. Additionally, the competing situation amongst the European colonial powers was considered to be a threat against the Dutch colonial interests in the Netherlands Indies. This was a significant factor behind the reason why the Dutch colonial rulers expanded to all of the indigenous rulers in the Netherlands Indies, including the Bali traditional rulers in the beginning of the twentieth century. In Bali, this was called the Puputan, meaning the "end", in which the traditional Bali

* Vice-President dari IFSSO (*International Federation of Social Science Organizations*) dan *founding members* dari *World Social Sciences and Humanities* (WSSH). Sebelumnya adalah Kepala Bidang Penelitian Asia Tenggara di LIPI, kini Ketua Pusat Kajian Bali (PKB) dan Ketua International Office (IO) Universitas Udayana. Risetnya berkaitan dengan multikulturalisme dan diaspora, serta wacana sejarah dan politik di Asia Tenggara. Menulis disertasi yang terbit di Jerman, *Nusa Tenggara nach Einrichtung der Kolonialherrschaft von 1915 bis 1950*, dan telah diterjemahkan *Penataan Nusa Tenggara Pada Masa Kolonial 1915-1950* (Jakarta: Raja Grafindo Persada). Email: phejepsdrlipi@yahoo.com

1 Makalah disampaikan pada Seminar "Puputan Badung" di Monumen Perjuangan Rakyat Bali (Banjra Sandhi) Denpasar pada tanggal 3 November 2011.

rulers were finally defeated. In relation to this, this paper is attempted to show the different perspectives on the idea of Puputan between the local and Dutch. Furthermore, this is expected to contribute a better understanding on how the Balinese rulers and their people defended their sovereignty from the foreign powers.

Keywords: puputan of Badung, modern imperialism, cooperation, conflict, local perspective, Dutch perspective

Pendahuluan

Dinamika sejarah politik masyarakat Indonesia pada umumnya, dan Bali pada khususnya ketika memasuki akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 ditandai dengan muncul reaksi yang keras terhadap upaya penguasa asing yang berkeinginan mengokohkan kekuasaannya di Indonesia. Ini dapat dimengerti karena seperti yang dikemukakan oleh Roeslan Abdoelgani pemikir sejarah politik Indonesia paska-kemerdekaan menyebutkan bahwa bangunan negara-bangsa (*nation-state building*) yang muncul kemudian sebenarnya merupakan “reaksi” dari pandangan tentang konsep nasionalisme di negara barat yang jauh sebelumnya telah terjadi pada abad ke-18 dan abad ke-19. Apa yang membedakannya dengan kemunculan nasionalisme di negeri timur yang terjadi pada awal abad ke-20?

Ada beberapa hal yang menyebabkan mengapa perbedaan konsep tentang nasionalisme ini bisa terjadi. Diantaranya adalah kesadaran nasionalisme di Barat yang cenderung menuju terbentuknya nasionalisme yang chauvinistis, yaitu nasionalisme yang mengagung-agungkan Negara bangsa yang menganggap bangsa sendiri lebih baik dari negeri yang lain. Akan tetapi, apabila konsep ini digerakkan oleh penguasa dan didukung oleh kelompok militer, maka terjadilah perang antar bangsa yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya penyebaran paham imperialisme ke negeri lainnya. Ini yang menyebabkan perbedaannya dengan negeri timur pada umumnya, dimana kesadaran historis yang

muncul di setiap individu itu, menyerahkan rasa kesetiaan tentang kesadaran tertinggi individu itu pada Negara-bangsa. Kesadaran yang terbentuk ini pada dasarnya merupakan pengalaman kolektif (*collective memories*) yang terbentuk berdasarkan kesamaan pengalaman sejarah yang tidak menginginkan adanya kekuasaan asing di negeri sendiri.

Didasari pemikiran ini tampaknya dapat dimengerti tidak hanya terdapat perbedaan mengenai konsep nasionalisme yang berbeda antara Barat dan masyarakat lokal, tetapi juga dalam konteks ini terdapat perbedaan antara konsep puputan Badung di mata Barat dan masyarakat lokal. Tambahan pula, tidak hanya terdapat perbedaan cara pandang mengenai konsep puputan Badung ini oleh Barat dan masyarakat lokal dalam konteks masyarakat Bali di tingkat lokal, namun di skala nasional terdapat perbedaan antara konsep kemerdekaan yang diperoleh Indonesia dengan perjuangan atau revolusi berdarah (*bloody-revolution*) dalam kaitannya dengan “pengakuan” kedaulatan, dan bukan dengan “penyerahan” kedaulatan sebagaimana yang pernah diinterpretasikan oleh Belanda. Baru akhir-akhir inilah kemerdekaan Indonesia itu yang diakui dengan perebutan kemerdekaan dan bukan dengan penyerahan kedaulatan oleh Belanda kepada Indonesia.

Adanya dominasi politik Belanda terhadap negeri yang dijajahnya, dapat dipahami, mengapa tampak terjadi tidak adanya titik temu antara kedua kepentingan yang saling bertentangan itu, sehingga tidak mengherankan mengapa terjadi benturan-benturan dalam mengimplementasikan kebijakan kolonial di negeri jajahan. Sudah sejak lama, terutama ketika masuknya penguasa Barat baik yang bernaung di bawah panji-panji “Perang Salib” atau “Perang Sabil” sudah berkeinginan menancapkan kuku kekuasaannya di negeri-negeri yang didatanginya. Di satu pihak, penguasa-penguasa lokal memahami akan apa yang ada di balik panji-panji itu, sehingga berbagai strategi pun diterapkannya untuk mengantisipasi kedatangan penguasa-penguasa kolonial. Ini bisa terjadi karena masing-masing negeri atau kerajaan-

kerajaan yang didatanginya itu sebenarnya memiliki otonominya masing-masing. Lihat saja misalnya bagaimana Aceh pada akhir abad ke-19 masih memiliki pusat-pusat perdagangan yang masih dikontrol oleh Sultan Aceh. Di Bali, misalnya bagaimana kekuasaan kerajaan-kerajaan masih berlangsung sampai akhir abad ke-19. Tidaklah benar kalau dikatakan Indonesia dijajah selama 350 tahun, karena eksistensi kerajaan-kerajaan itu masih ada. Hubungan-hubungan perdagangan dan politik dilakukan dengan penguasa kolonial hanya sebatas menguntungkan kepentingan mereka. Dengan kata lain, tidak ada keinginan untuk bergantung pada kepentingan barat, apalagi mengakui kekuasaan mereka itu. Fenomena inilah yang terjadi dimana hubungan-hubungan kekuasaan lokal dengan Belanda dilakukan sebatas hubungan saling membutuhkan. Tidak ada keinginan mengakui supremasi kekuasaan Belanda di negeri Nusantara ini. Namun demikian, di pihak kekuasaan kolonial Belanda ada strategi tertentu yang ingin diimplementasikannya karena penguasa kolonial mengetahui akan politik yang diterapkan oleh mereka. Untuk itu, dalam menerapkan strategi imperialisme modern nya Belanda sejak abad ke-18 dan akhir abad ke-19 mengisyaratkan perlunya strategi melalui perdagangan dan hubungan hubungan tidak langsung sepanjang memungkinkan, dan melalui hubungan langsung melalui aksi militer apabila diperlukan.

Dalam hal ini sesuai dengan konsep imperialisme modern yang dikemukakan oleh Mommsen yang memperkenalkan konsep *indirect rule, if possible and direct rule, if necessary*. Artinya, bagi negeri-negeri yang dianggap sulit untuk dilibatkan dalam kerjasama atau ditaklukkan, maka pemerintah kolonial Belanda mengedepankan hubungan tidak langsung yaitu masih mengakui keberadaan raja-raja lokal dengan aparat birokrasi modernnya dimana hubungan politik dan perdagangan itu dilakukan. Inilah yang menyebabkan mengapa berbagai kontrak perjanjian yang disebut dengan Perjanjian atau Plakat Panjang, *Lange Verklaring (Long Declaration)* yang banyak ditandatangani oleh raja-raja lokal dan penguasa kolonial Belanda sekitar abad ke-18 dan akhir

abad ke-19. Perjanjian panjang ini berisi lebih dari 30 pasal yang mengatur hubungan di antara keduanya dan yang terpenting diantaranya tidak diperkenankannya mengadakan hubungan dagang atau politik dengan negara lain, selain dengan penguasa kolonial Belanda sendiri.

Inilah perjanjian atau kontrak politik yang mengikat hubungan antara penguasa lokal dan masyarakatnya dengan penguasa kolonial Belanda. Dengan ditandatanganinya perjanjian panjang itu, berarti pula penguasa lokal tidak mengakui secara mutlak bahwa mereka berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Mereka pun menyadarinya bahwa tidak ada supremasi politik yang dimiliki Belanda dalam mengatur kekuasaan penguasa lokal. Hubungan politik yang disepakati bersifat sejajar, sehingga penguasa lokal merasa yakin bahwa ia masih bebas secara otonom mengatur kekuasaan atas kehidupan rakyatnya. Di pihak Belanda pun, memahami benar bahwa hubungan politik yang dimilikinya itu bersifat terbatas. Untuk itu, diperlukan strategi lain yang lebih efektif untuk dapat mengontrol kekuasaan penguasa lokal diantaranya dengan strategi kebijakan langsung dan dengan aksi militer. Diperlukan waktu yang cukup lama untuk menerapkan kebijakan penguasa kolonial ini di tanah jajahan mereka.

Di Bali, beberapa kerajaan seperti Bangli, Karangasem, Gianyar, Jembrana masih bisa dikontrol oleh Belanda. Buleleng sejak tahun 1848, Karangasem sejak tahun 1896 dan Gianyar sejak tahun 1900 (Ide Anak Agung Gde Agung, 1989: 670). Akan tetapi, beberapa kerajaan seperti Tabanan, terutama kemudian Kerajaan Badung dan Kerajaan Klungkung tidaklah dengan mudah dapat dikontrol dengan Belanda. Ada berbagai strategi yang diterapkan, namun tanpa hasil yang memuaskan pihak Belanda (cf. Sidemen, 1992). Nasionalisme Belanda yang berkembang abad ke-19 di Eropa melahirkan jiwa imperialisme dan memiliki rasa bersaing sebagai bangsa yang unggul dengan imperialisme Barat lainnya seperti Inggris, Prancis, Portugis, Spanyol, dan kemudian dengan imperialisme Amerika. Persaingan-persaingan ekonomi dan politik yang terjadi menyebabkan upaya penaklukan

wilayah koloni baru untuk dijajah dan menguntungkan negeri induknya. Sementara nasionalisme Indonesia muncul dari sikap ketidaksimpatian dari kebijakan pemerintah imperialisme Barat terhadap negeri yang dijajahnya dapat dianggap sebagai sebuah reaksi atau penentangan terhadap sikap-sikap menjajah negeri lainnya. Kondisi ini yang membedakannya pemahaman tentang nasionalisme itu sendiri yang sangat berbeda pula dalam melihat reaksi yang muncul di tanah jajahan, ketika kekuasaan barat yang hegemonial berusaha menaklukkan penguasa-penguasa lokal di hampir seluruh negeri Nusantara.

Makna Puputan: Pandangan Lokal versus Barat

Pandangan lokal yang ditulis ini sangat membantu memahami bagaimana keinginan raja Badung untuk tetap memiliki kewenangan mengatur wilayahnya secara otonom. Kedatangan Belanda hanya mengganggu kestabilan yang ada wilayah kerajaan untuk itu berbagai upaya pendekatan yang dilakukan akan dihadapi secara ksatria. Akan tetapi, Belanda tetap saja pada pendiriannya untuk menguasai kerajaan Badung dimana satu persatu kerajaan-kerajaan yang ada di Bali dapat ditaklukkannya seperti Gianyar, bangle, Karangasem dan hanya Badung, Tabanan, dan Klungkung yang masih tidak mengakui keberadaannya. Bagi Belanda yang menerapkan kebijakan imperialisme modernnya tidak mau menyerah berbagai strategi yang diterapkan kerajaan Bali ini terlebih-lebih Badung, Tabanan dan Klungkung yang dianggap menjadi benteng-benteng terakhir kerajaan yang ada di Bali.

Menurut Creese et al. (2006) dalam buku yang berjudul *Seabad Puputan Badung Perspektif Belanda dan Bali* terdapat pandangan yang melihat bagaimana satu perang yang memiliki dua perspektif yaitu pandangan lokal dan pandangan Belanda sebagai berikut ini.

Pandangan Lokal

Creese et al. (2006) mendasari pandangan lokal ini atas teks-teks menjadi 4 jenis yaitu sebagai berikut

Kidung Geguritan Bhuwanawinasa

Buku yang dikarang oleh Ida Pedanda Ngurah dari Griya Gede Blayu ini lebih melihat tanda-tanda alam, seperti adanya bintang kiskus atau bintang berekor panjang yang terjadi tahun 1880, sebagai tanda akan terjadinya bencana. Apa yang diyakini itu tampaknya menjadi kenyataan dengan terjadinya pembrontakan di Gianyar dan terjadinya gempa besar di Bali tahun 1917. Buku Ngurah yang dikarang mulai 7 Oktober 1918 hingga 11 Desember 1918 dianggap penting karena mampu mengisahkan saat wafatnya Raja Badung Cokorda Ngurah Alit II (1890-1901) dan digantikan oleh Cokorda Ngurah Made Pamacutan yang dikenal sebagai Cokorda Mantuk Ring Rana tanggal 20 September 1906. Selain itu, buku ini mampu mengisahkan bagaimana peran “orang Jawa” (orang luar dan orang Jawa sendiri) yang dianggap sebagai prajurit Belanda yang menyerang Bali.

Buku Catatan Harian Perang Perang Badung 1906

Buku catatan ini milik I Gusti Putu Jlantik yang menuliskan pengalamannya dalam bahasa Belanda pada catatan harian (*dagboek*), ketika bertugas sebagai juru bahasa dan mengantarkan pasukan Belanda ke Badung. Dia pula yang memfasilitasi relasi politik antara Belanda, dalam hal ini F. A. Liefrinck dan Raja Badung pada bulan Mei dan Desember 1904. Ia datang ke Kerajaan Badung dan Kerajaan Tabanan,² membahas kerugian kapal Sri Komala yang terdampar 27 Mei 1904. Karena tugasnya ini ia datang ke kedua kerajaan itu antara 1904 dan 1905 tentang penghapusan upacara *mesatya* di Bali Selatan. Ia terlibat dalam pemblokiran pelabuhan Sanur dan Yeh Gangga Januari hingga Juni 1905. Tambahan pula,

2 Upaya yang dilakukan Belanda tampaknya tidak membuat bergeser sikap Raja Badung dan rakyatnya. Bahkan, Badung sendiri mendapat dukungan dari raja Tabanan untuk melawan Belanda dan bahkan bantuan barang-barang dialirkan ke Badung dari pelabuhan lainnya. Dukungan raja memiliki alasan politik dan sejarah dalam hal ini keluarga kerajaan memiliki hubungan kekeluargaan dan sebagaimana dicatat oleh Korn (1922: 94--98), kedua raja memiliki perjanjian pertahanan bersama dan mendukung satu sama lainnya dalam konteks *mesatia*. Belanda mempersiapkan pasukan untuk dikirim ke Bali untuk menyerang kerajaan Badung dan Tabanan. Di kedua wilayah kerajaan ini telah mempersiapkan pasukannya apabila diserang oleh Belanda.

ia juga yang mendampingi Assisten Residen Schwartz ketika mengampunayakan Puputan Badung di Pantai Sanur pada 12 September 1906. Selain itu, ia juga yang menyerahkan surat tuntutan terakhir Belanda terhadap Raja Badung kepada Punggawa Sanur, Ida Bagus Ngurah yang akhirnya tunduk pada Belanda (cf. Ida Pedanda Ngurah Blayu, *Bhuwanawinasa*).

Babad Arya Tabanan

Babad Arya Tabanan ini ditulis oleh Anak Agung Ngurah Putrakusuma dari Krambitan, Tabanan. Karya ini melukiskan masa Majapahit hingga dengan datangnya leluhur yang menurunkan Arya Kenceng sampai tahun 1930-an. Dalam kaitannya dengan Puputan Badung adanya pengisahan hari terakhir Kerajaan Tabanan ketika Raja Gusti Ngurah Agung ditaklukkan oleh Belanda di bawah Jenderal Rost van Tonningen pada tanggal 28 September 1906. Gusti Ngurah Agung beserta keluarga diungsikan ke Desa Beringkit kemudian ke Denpasar untuk bertemu F.A. Liefrinck. Mereka sebenarnya akan diungsikan ke Lombok, akan tetapi malam harinya ia dan salah seorang putranya Gusti Ngurah Anom bunuh diri di Puri Denpasar.

Ceritra Seorang Wanita Hamil Muda

Ceritra Seorang Wanita Hamil Muda ini ditulis oleh Anak Agung Sagung Putri Agung Kapandyan, anggota keluarga Puri Denpasar yang dipublikasikan di *Bali Post* antara 19 sampai dengan 26 September 1977. Cerita yang disusun berdasarkan informasi lisan sekitar tahun 1970-an dari para orang tua yang langsung terlibat dalam puputan. Bagian terpenting dari buku ini adalah pengkisahan perasaan seorang istri yang hamil muda, Jero Nyoman Nuraga dari Desa Pendarungan-Mengwi ketika puputan. Jero Nuraga adalah istri dari Anak Agung Alit Badra putra sulung dari Ida Cokorda Alit Ngurah Pamacutan yang bertahta di Puri Denpasar sampai tahun 1901. Ia mengisahkan bagaimana ia melihat langsung rentetan peristiwa seperti pembakaran mayat Cokorda Puri Denpasar dan saat upacara *mesatya*, salah seorang wanita

yang bernama Ida Ayu Supat. Kisah dimulai dari perjalanan dari mengungsi ke Kerobokan, Legian sebelum puputan. Kemudian ia kembali ke puri dan berada di samping suaminya Alit Badra dan Raja Denpasar untuk mempertahankan Kerajaan Badung. Tambahan pula, dikisahkan para wanita hamil berjejer bersama wanita lainnya untuk mendapatkan keris dan pembagian uang emas yang digunakan untuk *mesangkerura*, yaitu dilemparkan kepada tentara musuh dengan maksud mengutuk agar mereka tidak mendapatkan keselamatan. Jero Nuraga sendiri tidak gugur dalam perang, tetapi ia melihat langsung akibat perang, yaitu adanya mati *masatya* di medan perang yang dilakukan oleh mertuanya sendiri, Jero Siulan ketika melihat jenazah putranya Anak Agung Alit Badra yang sudah tidak bernyawa. Jero Nuraga yang berpakaian kotor dan berlumuran darah juga ikut disuruh membantu mencari air minum di sumur bagi tentara Belanda yang kehausan. Ia diceritakan selamat dan akhirnya dibawa kembali ke tempat asalnya dan melahirkan bayinya dengan selamat di Desa Penarungan.

Ida Cokorda Ngurah Agung, *Lintasan Babad Badung* (1983)

Selain itu, masih ada beberapa informasi-informasi lokal lainnya yang dapat dipergunakan sebagai bahan pembandingan dalam kerangka pemahaman peristiwa puputan Badung secara lebih utuh dan komprehensif. Misalnya karya yang ditulis oleh Ida Cokorda Ngurah Agung pada tahun 1983 yang dikoleksi di Puri Satrya yang ditulis oleh pengarangnya sendiri dengan judul *Lintasan Babad Badung*. Karya ini mengisahkan bahwa pada tanggal 16 September 1906 Belanda menyerang Puri Denpasar dan Puri Pamacutan dari kapal-kapal mereka yang berada di pantai Sanur. Raja Badung, Cokorda Ngurah Made Agung menyadari Belanda menyerang sebagai konsekuensi dari kebijakannya yang menolak tuntutan Belanda.

Pada tanggal 19 September 1906 Raja Badung mengadakan upacara *mesatya* untuk raja yang meninggal (cf. Putra Agung, 2010), Cokorda Alit Ngurah Pamacutan (ayah dari I Gusti Alit Ngurah)

yang meninggal pada tahun 1902. Pada saat yang bersamaan ketika Belanda memerintahkan menyerang Badung, diadakan upacara *mesatia* oleh seorang wanita brahmana, Ida Ayu Supi. Ia menceburkan diri ke dalam api di dalam mana jenazah korban dari raja dilakukan. Cokorda Ngurah Made Agung mengambil abu dari raja yang meninggal dan meletakkan di dalam *destar* (ikat kepala) yang akan dipergunakannya pada hari berikutnya pada saat puputan dilakukan. Dengan cara ini diyakini bahwa perjuangan dari rakyat Badung akan diberikan kekuatan oleh raja yang meninggal.

Raja Badung, Cokorda Ngurah Made Agung sangat sedih tentang korban yang berjatuhan akibat serangan Belanda. Raja sendiri memutuskan untuk melakukan puputan pada hari berikutnya. Tujuan dari puputan itu adalah untuk mempertahankan kebenaran dan Raja Badung meminta kepada keluarga puri dan rakyatnya kalau mereka ingin akan secara bebas mengambil bagian dalam puputan itu. Keluarga puri dan pengikutnya menyetujui dan secara kuat mendukung keputusan raja untuk melakukan puputan (Agung, 1983: 169). Konsep *puputan* itu memiliki arti politik dan agama. Secara politik ini berarti bahwa kekalahan tidak harus diikuti dengan penyerahan, tetapi harus diikuti dengan semangat perang sampai wafat di medan perang. Dalam konteks agama, ini berarti bahwa kalau ada yang meninggal dalam peperangan itu, mereka akan masuk surga. Sebagaimana catatan yang ditulis oleh Cokorda Ngurah Agung sebelum pergi ke perang, rakyat Badung diperciki air suci (*tirta pengentas*) yang berarti bahwa apabila mereka wafat dalam perang, jiwa mereka akan masuk ke surga atau Wisnu Loka.

Pandangan Barat

Apa yang terjadi di Aceh dalam kaitannya dengan perubahan kebijakan tidak langsung menjadi langsung juga terjadi di Bali. Sampai permulaan abad ke-20, (sebelum puputan), Belanda tidak mampu mengimplementasikan kebijakan politiknya secara penuh di Bali, karena pengaruh yang masih kuat khususnya di

Bali Selatan. Belanda menganggap kondisi ini tidak bisa diterima dalam kaitannya dengan *Pax Neerlandica* yang dilaksanakan. Oleh karena itu, pemerintah kolonial Belanda merencanakan mengubah dan menempatkan raja-raja Bali di bawah kekuasaan mereka. Pada tanggal 1 Oktober 1904 Ratu Wilhelmina mengangkat Benedictus van Heutz sebagai Gubernur Jenderal di Hindia Belanda. Pengangkatan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi terbentuknya *Pax Neerlandica*.

Rost van Tonningen, *Laporan umum Kepala Staf Ekspedisi ke Bali 10 September – 30 Oktober 1906.*

Laporan yang ditulis oleh Rost van Tonningen yang disampaikan dalam pidato di Pabean Sanur pada tanggal 30 Oktober 1906 lebih banyak mengenai proses bagaimana ekspansi tentara Belanda yang berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan di Bali Selatan seperti Badung, Tabanan, dan Klungkung. Laporan ini dapat membantu memahami, pertama, bagaimana terjadinya konflik di Bali Selatan yang berhasil diciptakan Belanda berkaitan dengan persoalan perbatasan antara Gianyar dengan kerajaan-kerajaan lainnya di Bali, seperti Badung, Tabanan, Bangli, dan Klungkung, setelah Kerajaan Gianyar menyerahkan kekuasaannya kepada Belanda pada tahun 1900. Apa yang dilakukan ini bisa dimengerti dalam konteks politik kolonial Belanda yang menerapkan politik memecah belah (*divide at empera*) antara kekuatan-kekuatan yang ada.

Dengan terjadinya konflik ini, paling tidak penguasa kolonial Belanda berhasil memetakan kekuatan yang ada di Bali dalam upaya mempermudah ekspansi kolonial di wilayah itu. Meskipun demikian, persoalan konflik perbatasan ini, bukanlah target utama penguasa Belanda, melainkan sebagai (*entry point*) untuk lebih mengintensifkan kekuatan sebelum serangan dilakukan. Oleh karena itu, konflik lokal yang terjadi ini dapat diselesaikan ketika disepakati untuk memberikan tanda pemisah perbatasan antara daerah-daerah pemerintah/ gubernemen dengan daerah-daerah yang berdaulat pada tahun 1902.

Karena Rost van Tonningen adalah seorang kepala staf ekspedisi ke Bali sehingga dapat dipahami mengapa ia bisa menggambarkan segala rencana strategi Belanda dalam meraih kemenangan bagi Belanda. Misalnya, mengenai latar belakang atau rencana operasi (ekspedisi) yang dilakukan, jalannya ekspedisi, pendaratan atau penaklukan Badung dan Tabanan berkaitan dengan persiapan konsumsi para tentara, siapa yang bertugas, dimana, dan apa target yang dicapai, dan gerakan selanjutnya seperti penyerangan Bangli dan Klungkung. Dari apa yang ditulis oleh Rost van Tonningen tampak bahwa strategi perang yang diterapkan adalah strategi perang modern yang berbeda dengan apa yang diterapkan oleh raja-raja Bali Selatan.

Meskipun tulisan Rost van Tonningen standar dalam strategi penyerangan dengan target mencapai tujuan kemenangan, paling tidak melalui tulisan ini dapat dilihat adanya keinginan Belanda yang tidak hanya menerapkan kebijakan kekuasaannya atas dasar hubungan dagang dengan hubungan yang tidak langsung, tetapi lebih dari itu ingin menerapkan kekuatan militer dan penerapakan kekuasaan secara langsung. Di sinilah kalau dilihat konsep implementasi imperialisme modern terbukti dilakukan oleh Belanda terhadap wilayah koloni-koloninya di Indonesia.

JHR. DR. H.M. van Weede, *Kenang-Kekangan Perjalanan di Hindia Belanda*

Van Weede adalah salah seorang anggota pasukan dalam battalio ke-18 yang ikut melihat langsung bagaimana penyerangan dilakukan terhadap wilayah-wilayah strategis seperti Tukad Ayung, Tangtu, Kasiman yang merupakan kampung pertahanan orang Bali. Van Weede melukiskan bagaimana jiwa seorang ksatria Nali yang rela berkorban tanpa pandang mundur menyerah sebagai berikut.

Saya melihat dengan jelas bahwa seorang Bali yang pembrani itu yang berada di daerah ketinggian yang hanya berjarak 200 m dari pasukan infanteri kami yang terus bergerak maju, tetap berdiri

tegak dengan tombak panjang yang digenggam erat dengan kedua tangannya dan ditancapkan di tanah di depannya tanpa ada keinginan untuk menyingkir. Dengan gerakan, suara dan sikapnya yang berani dan tidak takut mati dia mendorong teman-teman seperjuangannya untuk menyerang terus. Pakaianya dilengkapi kain putih di pinggang dan baju lengan pendek merah serta ikat kepala. Terlihat peluru-peluru jatuh di sampingnya dan bahkan ada yang mengenai antara kakinya. Tubuhnya yang berotot itu berusaha untuk tetap berdiri tegak tanpa bergoyang. Akhirnya tubuh pahlawan itu membungkuk ke depan bersandar pada tombaknya yang berlapis emas itu diangkatnya setinggi mungkin, sebelum akhirnya terkulai mati (Creese et al., 2006: 68).

Apa yang ditulis oleh Van Weede ini sebenarnya ia melukiskan bentuk dan nilai karakter yang terdapat pada orang Bali yang rela berkorban demi tanah airnya yang dicintai itu, meskipun berbagai peralatan persenjataan yang dimilikinya tidak seimbang kualitasnya dengan yang dimiliki oleh pasukan Belanda. Perspektif van Weede ini dapat dianggap merepresentasikan perspektif barat atau Belanda yang mengakui keteguhan hati pejuang Bali sehingga disebutnya sebagai pahlawan sebagaimana yang ditulis oleh Creese et al. (2006: 68-71). Bahkan ketika kapal-kapal Belanda berlabuh di Sanur perhatian Raja Badung dikatakan tidak terusik. Van Weede juga mengakui bagaimana ribuan pasukan disiapkan di Badung dapat mempersulit Belanda. Memang apa yang dilukiskan oleh Van Weede sebagaimana tampak sifat *neerlandocentrisme* seperti ditonjolkannya peran Overste van Schauroth yang berhasil merampas meriam yang dimiliki pejuang Badung dan kontrol keamanan yang dilakukan oleh Mayor Bryan, sementara pasukan Badung dianggapnya tidak mampu menggunakan persenjataan secara profesional.³ Namun demikian, paling tidak sumber yang ditulis Van Weede ini bermanfaat dalam menggambarkan bagaimana pasukan

3 Sebagai referensi, baca: F. W. Stapel, *Geschiedenis van Nederlandsch Indie*, Amsterdam, 1943. Lihat juga H. A. J. Klooster, *Indonesiers Scrijven Hun Geschiedenis: De Ontwikkeling van de Indonesische Geschiedbeoefening in Theorie en Praktijk 1900-1980*. Dordrecht: Foris Publications, 1985.



Tentara Belanda sedang berbivak di Sanur (*Weekblad voor Indie* III, 1906-07, hal. 673).

Badung kalah strategi dengan pasukan Belanda. Misalnya saja ketika pasukan Belanda pergi ke Sesetan, maka pasukan Badung juga memperkuat Sesetan, sementara arah utara dan timur tampaknya lemah yang kemudian menjadi sasaran penyerangan pasukan Belanda terhadap Badung. Inilah kesalahan yang terjadi menurut van Weede yang melihat pergerakan pasukan Badung ke Sesetan.

Cees, Puputan Pemecutan

Tulisan Cees ini lebih menggambarkan suasana ketika pecahnya Puputan, dimana rumah-rumah sepanjang jalan terbakar. Pasukan Belanda terheran-heran ketika melihat bahwa para brahmana tidak takut mati. Yang menarik dari deskripsi Cees ini adalah bagaimana seorang pejuang Badung yang dilukiskan sebagai berikut.

“Secara terpisah di sana terlihat seorang prajurit yang sambil mengacungkan kerisnya tinggi-tinggi, berkeliling mencari-cari prajurit lain yang belum mati dan setiap kali menemukannya dia

langsung menghujamkan kerisnya ke dada mereka. Akhirnya tembakan dari pasukan artileri merobohkannya dan mengakhiri semua perbuatannya.”

Tidak hanya laki-laki, tetapi para wanita pun melakukan ini. Apa yang dilukiskan oleh Cees ini tampaknya bahwa prajurit Badung yang meninggal dalam puputan, karena dibunuh oleh anggota prajurit lainnya. Apakah fenomena ini menunjukkan rasa keputusasaan sehingga mereka merelakan jiwa raganya dihabisi di tangan temannya sendiri? Paling tidak, ini dilakukan karena mereka tidak sudi berada di bawah kekuasaan Belanda. Dengan kata lain, daripada hidup dijajah, lebih baik mati berkalang tanah yang menandakan bahwa mereka tidak sudi dijajah oleh Belanda. Cees sendiri mengatakan bahwa mereka gugur dalam semangat kebersamaan sampai akhir hayatnya. Mereka melakukan itu dengan tidak ada penyesalan dan dilakukannya dengan ikhlas (Cees dalam Creese et al., 2006: 82).⁴

Imperialisme Modern Belanda dan Ide *Puputan*: Kerja sama dan Konflik

Telah diketahui bahwa hubungan politik yang dilakukan Belanda terhadap penguasa raja-raja di Bali dilakukan dengan menerapkan kebijakan melalui perdagangan dan kebijakan yang tidak langsung (*trade and indirect policies*). Dalam kurun waktu abad ke-19 tampaknya hubungan yang dijalin dengan raja-raja di Bali, seperti Gianyar, Bangli, Karangasem, Tabanan, Badung, dan Klungkung umumnya berjalan dengan lancar tanpa hambatan yang ditemukan oleh penguasa kolonial Belanda.

Akan tetapi, adanya persaingan-persaingan di tingkat global antara imperialisme Belanda dengan imperialisme Barat

4 Akan tetapi, kekalahan ini memberikan pandangan pada Negara tetangga lainnya, dimana Jepang misalnya menganggap akan tiadanya kekuatan di Asia yang mampu menghadapi barat. Oleh karena itu, Jepang pun di masa-masa berikutnya dalam sejarah modern mengikrarkan diri sebagai bangsa atau saudara tua yang akan melindungi, atau sebagai cahaya dan pemimpin bangsa Asia di masa depan, lihat Ardhana, (2011).

lainnya seperti Inggris, Prancis, Spanyol, Portugis, dan Amerika untuk menyebutkan beberapa di antaranya, tampaknya kebijakan penguasa kolonial Belanda yang hanya menerapkan kebijakan perdagangan dan hubungan tidak langsung dianggapnya tidak ada jaminan akan berlangsungnya hubungan yang sudah dijalin itu untuk waktu yang lama. Lihat saja misalnya bagaimana persaingan terjadi antara Inggris dan Perancis yang terjadi di Afrika yang membagi benua itu menjadi wilayah jajahan mereka masing-masing, di Asia Tenggara pun mereka berhasil meng"kawling" wilayah yang disebut dengan semenanjung Indo-China menjadi bagian jajahan Inggris di Birma, Malaysia, Singapura, Brunei, sementara Perancis di Laos, Kamboja, Vietnam, Portugis di Timor Leste, kecuali Thailand karena kecerdasan rajanya berhasil mengadu domba kekuatan Inggris dan Prancis, sehingga negeri yang dikenal dengan Negeri "Gajah Putih" itu sebagai satu-satu negeri di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh penguasa kolonial dan imperial Barat. Bagi Belanda, persaingan yang telah terjadi itu merupakan ancaman bagi kekuasaan Belanda terutama dalam kaitannya dengan perwujudan *Pax Neerlandica* bagi keseluruhan wilayah di Indonesia. Untuk itu, apabila tidak diambil tindakan atau aksi militer yang perlu, maka bisa jadi Belanda tergerus oleh persaingan-persaingan yang telah terjadi di kalangan kelompok imperialisme Barat itu.

Bagi penguasa kolonial Belanda, inilah momentum yang dianggap tepat untuk mengefektifkan kekuasaannya di Indonesia. Kalau di Aceh Belanda berhasil mengirimkan C. Snouck Hurgronje untuk mempelajari masyarakat dan budaya Aceh mengenai nilai-nilai yang menjadi akar kuat kebudayaan sekaligus mempelajari bagaimana cara merontokkan kekuasaan Aceh apabila, aksi militer dan politik langsung diimplementasikan di negeri Serambi Mekah itu. Belanda menyadari akan kekuatan Aceh sehingga ide Perang Sabil yang dilancarkan, juga berlangsung cukup lama karena militansi pasukan-pasukan Aceh yang dibekali semangat "jihad" melawan kelompok kafir penguasa Belanda. Perang Aceh berlangsung akhir abad ke-19 dan berlangsung hingga tahun

1911 menghabiskan biaya peperangan yang cukup besar di pihak Belanda. Belanda belajar banyak dari pengalaman Perang Aceh ini, itulah sebabnya mengapa Michiels yang pernah dikirim ke Aceh ini, juga dikirim ke Bali dalam rangka melakukan ekspansi militer di Bali.

Belanda sudah melihat kesempatan untuk memperluas kekuasaannya ke Bali pada tanggal 27 Mei 1904. Sebuah kapal kecil, *Sri Komala* milik Kwee Tek Tjiang dari Banjarmasin berlabuh di pantai Sanur dan dimana dikatakan bahwa kapal itu “dijarah” oleh masyarakat lokal di sana. Craandijk (1906: 836) mencatat bahwa setelah peristiwa itu, pemilik kapal mendatangi Residen Bali dan Lombok di Singaraja, J. Eschbach yang menuduh masyarakat Sanur merampas kapal itu. J. Eschbach memerintahkan Raja Denpasar membayar 3000 Ringgit (7.500 Gulden) sebagai kompensasinya. Akan tetapi, Raja Denpasar menolak untuk tidak memenuhi perintah itu.

Belanda di bawah H.J.E.F. Schwarz melaksanakan blokade ekonomi terhadap wilayah Badung dengan harapan Badung dapat mengurangi perlawanannya terhadap Belanda. Resolusi Gubernur Jenderal berkaitan dengan ekspedisi militer ke Bali ditentukan pada tanggal 4 September 1906. Tentara Belanda mendarat di Sanur pada tanggal 12 September 1906 di bawah pimpinan Mayor Jenderal M.B. Rost van Tonningen dan F. A. Lieftrinck. Sementara itu, Belanda mulai serangan mereka terhadap Badung dan adanya penyerahan yang dilakukan di sekitar Sanur.

Catatan yang dibuat oleh Tessel Pollman dalam karyanya “Margaret Mead’s Balinese: the Fitting Symbols of the American Dream” (1990: 4), yang mengutip dari karya W.O.J.N. Nieuwenkamp, yang berjudul *Leven en Werken* menggambarkan suasana ketika itu sebagai berikut:

The conquering of the south is a bloody affair, and its pinnacle is the puputan by the raja of Badung. In this ritual of large-scale murder and suicide, the raja and hundreds of relatives, all dressed in white, kill each other and themselves before the eyes of the colonial soldiers. Amazed and

shocked, the soldiers see the corpses falling upon each other or the victims exposing their bodies to the colonial army for the final, killing bullet. Afterwards, when the large heap of corpses is cleared away and the palace of the raja is burning, the soldiers loot the treasures.

Inilah salah satu karakter Bali yang perlu diangkat ke permukaan bahwa walau mereka kalah dalam puputan itu, namun apabila sesuatu itu diyakini dengan benar maka mereka akan melakukan secara ikhlas dan dengan rasa kebersamaan. Ini adalah konsep politik dimana mereka tidak akan mau menyerah pada musuh, melainkan melanjutkan perlawanan sampai titik darah penghabisan. Karakter ini yang tidak disadari oleh Belanda yang akan terjadi ketika meletusnya *puputan* yang dilakukan oleh prajurit Badung. Prajurit Badung telah ikhlas mati di medan laga melawan pasukan Belanda dengan senjata-senjata modern.

Dapat dikatakan bahwa apa yang diterapkan oleh Belanda di Indonesia dalam implementasi kebijakan imperialisme modernnya tampak dilakukannya secara menyeluruh di wilayah nusantara seperti di Sumatra Barat, Aceh, Bali, dan Nusa Tenggara (Ardhana, 2000 dan Ardhana, 2005) dan daerah lainnya di Indonesia. Ini membuktikan teori imperialisme modern yang dikemukakan oleh Wolfgang Mommsen, bahwa kebijakan imperialis kolonial Belanda melakukan perdagangan dan hubungan kekuasaan secara tidak langsung apabila memungkinkan, dan menerapkan aksi militer dan hubungan langsung apabila diperlukan. (Mommsen, 1997). Meskipun Belanda berdalih bahwa apa corak kebijakan imperialismenya di wilayah koloninya itu tidaklah sama dengan kebijakan imperialisme Baratnya lainnya, karena kemudian Belanda berupaya membedakannya dengan kebijakan politik imperialism modern lainnya dengan memberikan politik etis atau pendidikan kepada keturunan penguasa-penguasa lokal yang dianggapnya kalah perang.

Dengan kebijakan etis ini Belanda menginginkan agar keturunan raja yang meninggal bisa bekerjasama dan apa yang dilihatnya dalam puputan Badung itu tidak masuk akal, dan

mereka tidak menyangka kalau puputan itu dilakukan oleh raja, keturunan raja dan segenap rakyatnya. Kebijakan etis yang diintroduksi Belanda di masa-masa kemudian yang dilakukan dengan mengirimkan keturunan raja yang masih hidup untuk mengenyam pendidikan Barat di sekolah-sekolah Belanda (Locher-Scholten, 1994).

Simpulan

Puputan Badung yang heroik itu terjadi di Taensiat sebelah utara Puri Denpasar pada pukul 11.00 am pada tanggal 20 September 1906. Apa yang terjadi dalam Puputan Badung ini merupakan fenomena sejarah perjuangan rakyat Indonesia yang terjadi di kurun waktu itu. Misalnya saja bagaimana Perang Aceh dikobarkan dengan semangat Perang Sabil dimana ideologi agama memainkan peran signifikan dalam merekrut dan menggerakkan massa rakyat Aceh melawan kolonial Belanda. Demikian pula dengan peristiwa heroik yang terjadi dalam Puputan Badung ideologi agama Hindu, yaitu ide masuk surga Wisnuloka (Ardhana, 1991: 50), juga memainkan peran penting dalam menggerakkan massa rakyat Badung. Segenap rakyat Badung berupaya mempertahankan wilayah itu yang dipimpin oleh Gusti Gde Ngurah Denpasar, dikalahkan oleh battalioan kesebelas Belanda. Wafatnya Raja Denpasar berarti kejatuhan Puri Denpasar. Sisa laskar dan rakyat Puri Denpasar menuju Puri Pamacutan dimana mereka bertemu lagi dan dikalahkan oleh Belanda.

Sebagaimana halnya dengan peristiwa puputan di Puri Denpasar dimana dipimpin oleh Gusti Gde Ngurah Denpasar, sebelum pergi menghadapi Belanda Raja Gusti Ngurah Pamacutan kemudian bertemu dengan punggawa mereka dan keluarga Puri Pamacutan. Terdapat perbedaan bentuk perlawanan sebagaimana yang terjadi Puri Denpasar dan Puri Pamacutan. Belanda mengalahkan Puri Denpasar dengan mudah, karena mereka berkumpul dalam kelompok yang besar, sehingga tentara

Belanda berkonsentrasi menyerang kelompok yang berkumpul itu. Sebagaimana di Puri Denpasar, pasukan kekuatan raja Pamacutan adalah wanita dan anak-anak. Mereka berlanjut maju secara langsung ke arah senapan Belanda. Raja Pamacutan, Gusti Ngurah Pamacutan dibunuh dalam serangan itu. Raja akhirnya wafat untuk mempertahankan kebenaran. Raja dan rakyatnya memecahkan masalah yang dihadapinya dengan caranya sendiri secara terhormat dalam puputan itu.

Konsep *puputan* itu memiliki arti politik dan agama. Secara politik ini berarti bahwa kekalahan tidak harus diikuti dengan penyerahan, tetapi harus diikuti dengan semangat perang sampai wafat di medan perang. Dalam konteks agama, ini berarti bahwa kalau ada yang meninggal dalam peperangan itu, mereka akan masuk sorga. Sebagaimana catatan yang ditulis oleh Cokorda Ngurah Agung sebelum pergi ke perang, rakyat Badung diperciki air suci (*tirta pengentas*) yang berarti bahwa apabila mereka wafat dalam perang, jiwa mereka akan masuk ke surga atau Wisnu Loka.

Secara umum dapat dikatakan bahwa apa yang dipresentasikan oleh Creese, Darmaputra, dan Henk Schulte Nordholt (2006) dalam buku *Seabad Puputan Badung: Perspektif Belanda dan Bali* cukup memberikan gambaran ringkas dan umum tentang peristiwa Puputan Badung. Data-data yang dikumpulkan oleh kedua perspektif lokal dan Barat ini memang dapat membantu memberikan pandangan kedua belah pihak yang berperang. Namun demikian, perlu dicatat bahwa apa yang disampaikan dalam perspektif Belanda atau Barat itu, hanyalah gejala dan keputusan yang diambil di tingkat lokal sebagai implementasi kebijakan kolonial di daerah jajahan dalam upaya mewujudkan apa yang disebutnya sebagai politik *rust en order* (aman dan tertib) dalam kaitannya penciptaan *Pax Neerlandica* yang menjadi impian Belanda perluasan politik imperialisme modernnya. Sama sekali tidak disinggung apa yang terjadi di lingkaran kekuasaan Belanda di negeri induk baik di Den Haag, Amsterdam dan kota

lainnya. Mestinya perspektif Belanda atau Barat ini paling tidak dapat mengelaborasi informasi penting lebih jauh di pusat-pusat pengambil kebijakan pemerintah kolonial Belanda di negeri Belanda sendiri, sehingga upaya pemahaman secara utuh tentang apa keinginan Belanda menaklukkan Indonesia pada umumnya dan Bali pada khususnya, begitu pula persaingan politik ditingkat global saat itu akan membantu dalam memahami dinamika sejarah lokal Bali dan sejarah nasional Indonesia secara lebih komparatif dan komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Anak Agung Gde Agung, Ide. 1989. *Bali Pada Abad XIX*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ardhana, I Ketut. 1991. *Kerajaan Badung dalam Konteks Kolonial Belanda 1827—1906*. Laporan Penelitian. Denpasar: Universitas Udayana.
- Ardhana, I Ketut. 1993. "Balinese Puri in Historical Perspective: The Role of Puri Satria and Puri Pamacutan in Social and Political Changes in Badung, South Bali 1906—1950". (Unpublished Master Thesis). Canberra-Australia: Faculty of Asian Studies-the Australian National University (ANU).
- Ardhana, I Ketut. 2000. *Nusa Tenggara nach Einrichtung der Kolonialherrschaft*. Passau: Lehrstuhl für Südostasienkunde-Universität Passau (UP), Passau Germany.
- Ardhana, I Ketut. 2005. *Penataan Nusa Tenggara pada Masa Kolonial Belanda*. Jakarta: RajaGrafiti Press.
- Ardhana, I Ketut. 2011. "The Encyclopaedia of Indonesia in the Pacific War: In Cooperation with the Netherlands Institute for War Documentation", dalam *Indonesia*, April, 91. New York: Cornell Southeast Asia Program.
- Craandijk, H. 1906. "Bali en Imperialisme", *Indische Gids*, I.
- Creese, Helen, Darma Putra dan Henk Schulte Nordholt (eds). 2006. *Seabad Puputan Badung: Perspektif Belanda dan Bali*. Denpasar: Pustaka Larasan, KITLV-Jakarta, dan Fakultas

Sastra Universitas Udayana.

- Korn, V. E. 1922. *Balische Overeenkomsten*. S'-Gravenhage: Martinus Nijhoff.
- Klooster, H. A. J. 1985. *Indonesiers Scrijven Hun Geschiedenis: De Ontwikkeling van de Indonesische Geschiedbeoefening in Theorie en Praktijk 1900-1980*. Dordrecht: Foris Publications.
- Locher-Scholten, Elsbeth. 1994. *Sumatraans Sultanaat en koloniale Staat*. Leiden: KITLV Uitgeverij.
- Mommsen, Wolfgang, J. 1997. *Imperialismus Theorien*. Vandenhoeck Ruprecht.
- Pollman, Tessel. 1990. "Margaret Mead's Balinese: the Fitting Symbols of the American Dream", *Indonesia*. No. 49 (April). New York: Cornell Southeast Asia Program.
- Putra Agung, Anak Agung Gde. 2010. *Bali's Early Days: Widow Sacrifice, Slavery and Opium*. Kesiman: Saritaksu Editions.
- Ray, Jayanta Kumar. 1967. *Transfer of Power in Indonesia 1942-1949*. Bombay: Manaktals: Institute of Political and Social Studies.
- Sidemen, Ida Bagus, et al. 1992. *Sejarah Badung*. Badung: Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
- Stapel, F.W. 1943. *Geschiedenis van Nederlandsch Indie*. Amsterdam.